

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Bernegara, Praksis Kenegaraan Bermartabat dan Demokratis*. Malang: Setara Press, 2016.
- Asy'ari, Hasyim. *Konsolidasi Demokrasi: Pergulatan Politik Pemilu di Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Bakrie, Connie Rahakundini. *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Djuyandi, Yusa. *Hubungan Sipil dan Militer dalam Diskursus RUU Keamanan Nasional*. Yogyakarta: DIVA Press, 2019.
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. Jakarta: Retika Aditama, 2009.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Negara Demokrasi dan Civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Isrok dan Dhia Al-Uyun. *Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)*. Malang: UB Press, 2010.
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-undangan dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme Perekonomian*. Bandar Lampung: FH UNLA, 1996.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2002.

- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Rosyada, Dede, dkk. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sadjijono. *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008.
- Salam, Moch. Faisal. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2006.
- Schumpeter, Joseph A. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. New York: Routledge, 1994.
- Sjarif, Amiroeddin. *Hukum Disiplin Militer Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Tim Penyusun Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dan Badan Pengkajian MPR. *Penegasan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2018.
- Yulianto, Arif. *Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba di Tengah Pusaran Demokrasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Jurnal

- Agung, Dian, dan Bimo Fajar Hantoro. “Ambiguitas Kelembagaan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang Digabungkan.” *KNAPHTN* 2, no. 1 (2024): 52–96. <https://doi.org/10.55292/fgwg8n26>.
- Butarbutar, Aloysius Sahala, dan Elisabeth Nurhaini Butarbutar. “Peran Hukum dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Republik Indonesia yang Berkeadilan Sosial.” *Jurnal Hukum Justice* 2, no. 2 (Februari 2025): 123-133.
- Fikri, Abdullah. “Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Perspektif Konstitusionalisme.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 2 (November 2025): 438-459
- Fiter, Frengky Jon, Agustina Setiawan, dan Rira Nuradhawati. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Program Makan Bergizi Gratis Sebagai Strategi Bela Negara dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Nasional di

- Kabupaten Serang, Provinsi Banten Menggunakan Pendekatan Model Pentahelix.” *Jurnal Prinsip* 2, no. 1 (2025): 123-135
- Hadiyono, Venatius. “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State dan Tantangannya.” *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan* 1, no. 1 (Agustus 2020): 23-33.
- Hasan, Rizkiyawan. “Dinamika Konsep Welfare State di Indonesia: Antara Janji Konstitusi dan Kenyataan Ekonomi.” *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): 1–19.
- Malik, Gabriela Akhira, dkk. “Penerapan Demokrasi Berkeadaban dalam Kebudayaan dan Tradisi Suku Bugis.” *Jurnal Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2021): 702–715.
- Rakia, A. Sakti R.S. “Simplifikasi Terhadap Peraturan-Peraturan Pelaksanaan yang Dibentuk oleh Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 257–273. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.720>.
- Snekubun, Elyakim, Surya Wiranto, dan Ceppi Hilmansyah. “Resensi Hubungan Sipil Militer Negara Dalam Seragam: Analisis Subjektif Dominasi Militer Dalam Kebijakan Papua.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 2371–2382.
- Syahrul, Fathullah, dan Muh. Abdi Goncing. “Analisis Keterlibatan Militer dalam Jabatan Sipil Tahun 2019 di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Humaniora* 6, no. 2 (2020): 82–98. <https://doi.org/10.30738/sosio.v6i2.8080>.
- Tim Perkumpulan Peminat dan Ahli Kehutanan. “Hutan sebagai Kesatuan Fungsi Ekologi, Ekonomi, Sosial.” *Jurnal Rimba Indonesia* 77 (2024): 1–15.
- Tono, Mewa Ariani, dan Achmad Suryana. “Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran dari Penilaian dengan Kriteria Global dan Nasional.” *Analisis Kebijakan Pertanian* 21, no. 1 (2023): 1–20. <http://dx.doi.org/10.21082/akp.v21n1.2023.1-20>.
- Tutukansa, Aldho Faruqi, dan Enjang Dwi Tuffahati. “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Mutu Pendidikan Provinsi Papua sebagai Daerah 3T di Indonesia.” *Jurnal Khazanah* 14, no. 2 (2022): 85–99.
- Yacob, Christovel Yamado. “Problematika Penerapan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 161–174. <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1413>.

Internet

- Antara News. “Anggota DPR: SPPG Polri Tak Ada Kasus Keracunan karena Sesuai Standar.” Diakses 29 Januari 2026.
<https://www.antaraneews.com/berita/5146657/anggota-dpr-sppg-polri-tak-ada-kasus-keracunan-karena-sesuai-standar>.
- Badan Gizi Nasional. “Dapur Gizi Modular Siap Jangkau Wilayah 3T, BGN Pastikan Anak 3T Tak Tertinggal Gizi.” Diakses 11 November 2025.
<https://www.bgn.go.id>.
- . “Kupas Tuntas Semua Pertanyaanmu untuk Mengetahui BGN Lebih Dekat.” Diakses 11 November 2025. <https://www.bgn.go.id/faq>.
- . “SPPI Batch-3 Resmi Dimulai, Cetak Pemimpin Muda untuk Program Makan Bergizi Gratis.” Diakses 26 Januari 2026.
<https://badangizi.go.id/sppi-batch-3-resmi-dimulai/>.
- Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen.” Rilis pers. Diakses 10 November 2025.
<https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/2518/persentase-penduduk-miskin-maret-2025-turun-menjadi-8-47-persen-.html>.
- Beranda Post. “Pemprov Kaltim Akui Program MBG Tersendat untuk Daerah 3T.” Diakses 11 November 2025.
<https://berandapost.com/2025/11/13/pemprov-kaltim-akui-program-mbg-tersendat-untuk-daerah-3t/>.
- Biwilfa, Nuryetri. *Mewujudkan Kemampuan Ketahanan Pangan yang Kuat untuk Mendukung Perekonomian Nasional*. Jakarta: Kementerian Pertahanan RI, 2025. Diakses 10 November 2025. <https://www.kemhan.go.id/poathan/wp-content/uploads/2025/01/mewujudkan-kemampuan-ketahanan-pangan-yang-kuat-untuk-mendukung-perekonomian-nasional.pdf>.
- CNN Indonesia. “Kepala BGN Ungkap Alasan Tentara Kawal MBG Sampai Masuk Kelas.” Diakses 11 November 2025.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250125141510-20-1191423/kepala-bgn-ungkap-alasan-tentara-kawal-mbg-sampai-masuk-kelas>.
- Global Hunger Index. “Indonesia.” Diakses 10 November 2025.
<https://www.globalhungerindex.org/indonesia.html>.
- Humas Polri. “Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Polri.” Diakses 28 November 2025. <https://humas.polri.go.id/tugas-dan-fungsi>.

- Kemenko Polkam RI. "Groundbreaking SPPG Kemenko Polkam: Wujud Nyata Kehadiran Negara dalam Pemenuhan Gizi Masyarakat." Diakses 26 Januari 2026. <https://polkam.go.id/groundbreaking-sppg-kemenko-polkam-wujud-nyata-kehadiran-negara-dalam-pemenuhan-gizi-masyarakat/>.
- Kementerian Kesehatan RI. "Kemenkes Perketat Pengawasan dalam Program Makan Bergizi Gratis." Diakses 12 Januari 2026. <https://kemkes.go.id/id/kemenkes-perketat-pengawasan-dalam-program-makan-bergizi-gratis>.
- Kompas.com. "Dapur SPPG TNI untuk MBG Diklaim Tak Pernah Alami Kasus Keracunan." 28 September 2025. Diakses 29 Januari 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2025/09/28/10070861/dapur-sppg-tni-untuk-mbg-diklaim-tak-pernah-alami-kasus-keracunan>.
- Localise SDGs Indonesia. "Sustainable Development Goals." Diakses 10 November 2025. <https://localisedgs-indonesia.org/17-sdgs>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "877 Dapur SPPG Program Makan Bergizi Gratis Telah Beroperasi, Pemprov Upayakan Akselerasi." Diakses 27 Januari 2026. <https://jatengprov.go.id/publik/877-dapur-sppg-program-makan-bergizi-gratis-telah-beroperasi-pemprov-upayakan-akselerasi/>.
- Sekretariat Presiden. "Dialog Presiden Prabowo dengan CEO Forbes pada Forbes Global CEO Conference 2025." 15 Oktober 2025. Video YouTube, 12:45. <https://www.youtube.com/watch?v=97XQE7kc-LI>.
- Setjen Kemendikdasmen. "Kerja Sama Kemendikdasmen dan Badan Gizi Nasional dalam Pemenuhan Gizi Peserta Didik." Diakses 12 Maret 2026. <https://setjen.kemendikdasmen.go.id/app/kerja-sama-kemendikdasmen-dan-badan-gizi-nasional-dalam-pemenuhan-gizi-peserta-didik>.
- Sindo Prime. "Presiden Apresiasi Pilkada, Sebut Indonesia Negara Demokrasi Terbesar ke-3." 3 Desember 2025. Diakses 27 Januari 2026. <https://prime.sindonews.com/>.
- Sodiq, Fajar. "Sekolah-sekolah yang mengelola dapur mandiri di tengah ribuan kasus keracunan MBG." *BBC News Indonesia*. Diakses 11 November 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5y9j28r2wlo>.
- Tempo. "5 Temuan Baru Soal Program MBG: dari Privilege Polri hingga Usulan Bantuan Tunai." 8 Oktober 2025. Diakses 11 November 2025. <https://www.tempo.co/politik/5-temuan-baru-soal-program-mbg-dari-privilege-polri-hingga-usulan-bantuan-tunai-2077365>.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal.

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.